BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penggunaan doping dalam olahraga profesional di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan nasional yang sejalan dengan standar internasional yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi *International Convention Against Doping in Sport* melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2007 selain itu Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang LADI dan Peraturan IADO 2024 yang telah diselaraskan dengan *World Anti-Doping Code (The Code)*.
2. Kebijakan hukum kedepannya perlunya upaya pembaharuan atau penambahan ketentuan sanksi pidana di masa yang akan datang, baik sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan yang hingga saat ini belum memuat ketentuan pidana diadakannya ketentuan pidana melalui pembentukan undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur mengenai pelarangan doping dalam dunia olahraga di Indonesia.

B. Saran

1. Dari sisi pengaturan hukum, penulis menyarankan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dengan menambahkan ketentuan yang secara tegas mengatur larangan penggunaan doping dalam olahraga dan memuat sanksi pidana bagi para pelanggarnya. Regulasi ini harus mencakup rumusan pasal-pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang, jenis sanksi (pidana penjara atau denda), siapa saja yang dapat dikenai sanksi pidana (seperti atlet, pelatih, atau pihak yang membantu), dan mekanisme penegakannya. Alternatif lainnya adalah pembentukan Undang-Undang khusus Anti-Doping yang tidak hanya mengatur sanksi administratif seperti yang diatur oleh peraturan IADO, tetapi juga secara eksplisit memuat ketentuan mengenai sanksi pidana, sehingga dapat memberikan efek jera.
2. Menurut penulis, Pemerintah Indonesia perlu merumuskan kebijakan hukum nasional yang secara serius menangani masalah doping dalam olahraga. Kebijakan ini harus mencakup tindakan preventif melalui edukasi dan pengawasan terhadap atlet sejak dini, serta tindakan represif berupa penegakan hukum yang konsisten dan terkoordinasi. Selain itu, perlu dilakukan penguatan peran dan kapasitas Organisasi Anti-Doping Indonesia (IADO) agar dapat menjalankan tugas pengawasan dan penindakan secara efektif. Kolaborasi lintas sektoral antara Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kesehatan,

aparatus penegak hukum, dan organisasi olahraga nasional juga menjadi bagian penting dari kebijakan ini.